

Peran Pencegahan Fraud Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dan Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Agustina Indriani

Universitas Darma Persada, Jl. Taman Malaka Selatan, Jakarta, 13450, Indonesia

Histori Artikel:

Pengajuan: 28 September 2021

Revisi: 11 Oktober 2021

Diterima: 11 Oktober 2021

Keywords:

Fraud Prevention, Influence of Government Internal Control System (SPIP), Internal Control, Quality of Local Government Financial Reports

Kata kunci:

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pencegahan Fraud, Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP), Pengawasan Internal,

Abstract

This study aims to examine the effect of the government's internal control system and internal control on fraud prevention and its implications for the quality of regional financial reports. The sample used in this study were 89 respondents to local government employees in Bogor and Depok. The test is done using multiple linear regression analysis, the data is processed using SPSS. The results show that the influence of the government's internal control system has a positive effect on fraud prevention, while internal control has no effect on fraud prevention, while fraud prevention has a positive effect on the quality of financial reports. The Government's Internal Control System has a negative effect on the Quality of Regional Financial Reports and Internal Control has a positive effect on the Quality of Regional Financial Reports. The government's internal control system has an indirect effect on the quality of regional financial reports through fraud prevention. Internal control has a direct effect on the quality of regional financial reports through fraud prevention. Fraud prevention has a greater influence on the quality of regional financial reports. The internal control system of a business entity is strong, so the possibility of errors and fraud can be minimized. This means that the more successful the prevention of fraud, the quality of regional financial reports will increase.

Citation: Indriani, A. (2021). Peran Pencegahan Fraud Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Financial and Tax*, 70-85.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan internal terhadap pencegahan *fraud* serta implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 89 responden pada pegawai pemerintahan daerah bogor dan depok. Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, data diproses menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh secara positif terhadap pencegahan *fraud*, sementara pengawasan internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, sedangkan pencegahan *fraud* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh tidak langsung terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui pencegahan *fraud*, Pengawasan internal berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui pencegahan *fraud*. Pencegahan *fraud* memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sistem pengendalian intern suatu badan usaha kuat, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan bisa diperkecil Artinya semakin berhasil pencegahan *fraud* maka kualitas laporan keuangan daerah semakin meningkat.

JEL Classification: H83

Penulis Korespondensi:

Agustina Indriani
Tlpn/Phone: 08128500612
agustinareni81@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemerintah telah banyak mengeluarkan berbagai bentuk sistem yang seluruhnya berakhir pada tujuan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan tentu memiliki kegiatan yang cukup banyak dan sangat luas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan hingga evaluasi. Maka untuk dapat mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik tersebut pemerintah membentuk suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Sistem dimaksud adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau sering disingkat dengan SPIP.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/ Sedangkan Sistem Pengendalian Ekstern pemerintah dilaksanakan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK), DPR/DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga peradilan lainnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."Dengan adanya SPIP tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.

Peraturan Pemerintah (PP) no 60 tahun 2008 dalam pasal 48 menerangkan kalau pengawasan intern dijalankan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP melaksanakan pengawasan intern dengan a. Audit b. Reviu c. Evaluasi d. Pemantauan dan e. Aktivitas pengendalian yang berbeda. Aparat pengawasan intern pemerintah seperti dikemukakan pada Pasal 48 ayat (1) berupa atas a. BPKP, b. Inspektorat Jenderal dengan sebutan beda serta menurut efisiensi menjalankan pengendalian intern c. Inspektorat Provinsi; dan d. Inspektorat Kabupaten/Kota. Perilaku pejabat harus dijaga maka disusunlah kode etik APIP, untuk memelihara kualitas hasil audit yang dilakukan aparatur pengendalian intern pemerintah dibuat standar audit.

Pengawas internal dalam menyelesaikan tugasnya mesti memiliki kompetensi dalam melakukan audit agar kesimpulan dan rekomendasi yang akan diambilnya telah sesuai dengan standar dalam suatu organisasi tersebut. Pengawas internal yaitu fungsi penilaian independen dalam sebuah organisasi yang bermaksud guna memeriksa dan menilai aktivitas yang dijalankan untuk organisasi. (Boynton, 2007). Pengawasan intern menjalankan kegiatan evaluasi yang independen pada sebuah perusahaan untuk menganalisis ulang aktivitas-aktivitas pada ilmu akuntansi, keuangan serta sektor aktivitas yang berbeda untuk landasan dalam memberi bantuan untuk pimpinan. (Sawyer, 2005). Menurut Institute Internal Auditors (IIA), Fungsi Pengawasan intern yaitu buat membuktikan keunggulan informasi, kesesuaian menggunakan kebijaksanaan, persiapan, mekanisme dan peraturan

perundang-undangan, pengamanan terhadap aset, pemanfaatan sumber daya secara hemat dan efisien serta pencapaian tujuan. (Tugiman, 2006) Mautz & Sharaf (1961) menyatakan bahwa pengendalian intern mencakup suatu perencanaan, pengorganisasian dan seluruh teknik dan prosedur yang dilakukan dalam usaha untuk menjaga hartanya, mengoreksi ketepatan dan keunggulan informasi akuntansinya, mempromosikan ketepatan aktivitas dan memotivasi ketaatan pada aturan pimpinan yang disepakati. Internal control menurut COSO (Committee of Sponsoring Organizations) ada lima unsur yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, sistem informasi komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan. Internal control yaitu pihak manajemen memproses, membuat aturan dan langkah-langkah agar dapat meyakinkan bahwa pelaporan keuangan telah teruji dan pengerjaan laporan keuangan sudah dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi yang ada. Auditor mempertimbangkan Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dapat diwujudkan dengan sistem pengawasan intern yang tepat (Rahmawati et al., 2018).

Pengawasan intern yang kuat sangat penting bagi suatu organisasi, apabila pengawasan intern dalam suatu organisasi lemah atau tidak tepat dalam implementasinya maka dapat menimbulkan kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal organisasi sehingga akan merugikan organisasi itu sendiri (Sa'adah et al., 2017). Beberapa hal yang menyebabkan kelemahan pengendalian internal yaitu sensitivitas harta atau kewajiban tentang kehilangan atau fraud. (Tuanakotta, 2014).² Tuanakotta (2007) menyatakan pengendalian intern terdiri atas pengendalian intern aktif dan pengendalian intern pasif. Pengendalian intern aktif dilakukan dengan cara menutup peluang terhadap terjadinya penyimpangan sedangkan pengendalian pasif yaitu dilakukan untuk membuat jera orang-orang yang melakukan penyimpangan dengan memberikan sanksi yang berat.

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas keuangan yang didalam laporan keuangannya memiliki empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Relevan adalah apabila informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan para pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.

Kemudian Andal adalah apabila informasi yang disajikan pada laporan keuangan itu bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur dan dapat diverifikasi. Selanjutnya, dapat dibandingkan adalah laporan keuangan yang disajikan itu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Dan yang terakhir dapat dipahami adalah informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta dan istilah dengan batas pemahaman para pengguna (PP 71 Tahun 2010).

Fenomena laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Salah satu faktor yang dapat menciptakan laporan keuangan yang berkualitas yaitu Sistem Pengendalian Internal. Sistem pengendalian intern pemerintah, selanjutnya disebut SPIP, adalah sistem pengawasan intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP bisa dijadikan indikator awal dalam menilai kinerja suatu entitas. SPIP merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud) secara dini. SPIP akan membantu memandu entitas berjalan bagaimana semestinya. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif adalah agar pelaporan keuangan reliabel.

Selanjutnya variabel moderasi adalah Pencegahan Fraud. Risiko korupsi di instansi pemerintah pusat dan daerah maupun korporasi negara dan daerah belum terkelola dengan baik, karena inefektivitas pemberantasan korupsi yang disebabkan oleh rendahnya integritas individu dan lemahnya pengendalian intern serta belum optimalnya sinergi dan kolaborasi antar institusi pengelola risiko korupsi di Indonesia (Harahap, 2018). Data empiris menunjukkan bahwa yang paling banyak dikaitkan dengan korupsi adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Data penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK selama sepuluh tahun menunjukkan bahwa kasus korupsi didominasi oleh pengadaan barang dan jasa (sekitar 70 persen) atau lebih dikenal dengan proyek (Umar, 2018). Pada upaya pencegahan korupsi, kompetensi auditor internal dalam mencegah terjadinya korupsi

menjadi peranan dalam pencegahan korupsi, karena auditor internal pemerintah harus mematuhi peraturan ketenagakerjaan sebagai Pegawai Negeri dan harus mematuhi kode etik APIP dan standar audit APIP yang telah ditetapkan ketika melakukan pembinaan dan pengawasan, (Ulfah dan Lukiastuti, 2018).

Kepemilikan kode etik auditor menunjukkan dalam melakukan audit seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus di bidangnya. Keahlian auditor dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan serta pengalaman yang memadai dalam melaksanakan audit, (Daat, 2017). Seperti dalam kasus dana biaya penyelenggaraan ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp. 80 triliun dengan bunga sekitar Rp. 2,3 Triliun. Berdasarkan audit PPATK, ada transaksi mencurigakan sebesar Rp. 230 miliar yang tidak jelas penggunaannya, karena: (1) pengendalian intern sudah dirancang sedemikian rupa agar fraud yang terjadi dapat disembunyikan dari pihak pembaca laporan, (2) catatan akuntansi di Departemen Agama tidak mencantumkan secara gamblang hal-hal diluar pencatatan akuntansi seperti pengadaan barang-barang diluar Anggaran pembelanjaan kebutuhan haji, (kompasiana.com; 3 Maret 2017, diakses 18 Oktober 2019).

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah yaitu penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan intern, terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Namun faktor-faktor tersebut dapat lebih berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan apabila diperkuat dengan variabel moderasi, yaitu Pencegahan fraud, faktor-faktor tersebut dapat menjadi lebih berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan apabila, seorang aparat pemerintah yang punya komitmen terhadap organisasinya untuk lebih memajukan dan meningkatkan kinerja dari organisasi atau instansi tempatnya berasal, akan memulai dari peningkatan kinerja per masing-masing aparat tersebut, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhinya tersebut dapat lebih bermanfaat, berguna, serta menjadikan laporan keuangan lebih berkualitas. Penelitian mengenai kualitas laporan keuangan ini semakin banyak dilakukan oleh peneliti akuntansi (misal Ihsanti, 2014; Fikri, 2015; Ayu, 2016; Sanjaya, 2017; Edlin, 2018) namun penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dari penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Nurillah

(2014), penelitian ini menambahkan variabel kompetensi sumber daya manusia. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan internal dan kualitas laporan keuangan. Dan tujuan lainnya adalah untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan dengan dimoderasi oleh Pencegahan Fraud.

METODE

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan pendekatan analisis deskriptif asosiatif. Pengertian metode deskriptif menurut Nazir (2005:54) adalah: "Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu situasi, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki".

Didalam metode penelitian deskriptif, penulis menggambarkan dan menganalisis keadaan yang sebenarnya dilokasi penelitian secara sistematis dengan mengumpulkan data dan fakta untuk dianalisis. Menurut Nazir (2005:56) penelitian survei, yaitu: "Penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari sejumlah keterangan secara factual baik tentang institusi social, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah".

Menurut Sugiyono (2013:11). "metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam mengumpulkan data". Pengertian asosiatif menurut Sugiyono (2013:55) adalah " jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih".

HASIL

Dari hasil uji kepada 89 responden atas variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, pengawasan internal, pencegahan fraud, kualitas laporan keuangan dengan

taraf signifikansi 0,05 dapat disimpulkan bahwa masing - masing pernyataan kuesioner dianggap valid . Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh secara positif terhadap pencegahan *fraud*, sementara pengawasan internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, sedangkan pencegahan *fraud* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh negative terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh tidak langsung terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui pencegahan *fraud*, Pengawasan internal berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui pencegahan *fraud*. Pencegahan *fraud* memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sistem pengendalian intern suatu badan usaha kuat, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan bisa diperkecil Artinya semakin berhasil pencegahan *fraud* maka kualitas laporan keuangan daerah semakin meningkat.

PEMBAHASAN

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap pencegahan *Fraud*.

Berdasarkan hasil penelitian pada variable Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan *Fraud*. Aktivitas pencegahan terhadap *fraud* yang dilaksanakan dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan organisasi melalui pengendalian intern. Jika pengendalian intern suatu badan usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan semakin besar. Sebaliknya, jika pengendalian intern suatu badan usaha kuat, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan bisa diperkecil.

Untuk memperbaiki masalah yang ada pada system pengendalian intern pemerintah, dapat dilakukan dengan meningkatkan lingkungan pengendalian, penilaian risiko manajemen, aktivitas pengendalian dengan cara menambah SDM dibidang akuntansi agar ada pemisahan fungsi antara pencatatan, penerimaan, pengeluaran dan penyimpanan keuangan, system informasi informasi dan komunikasi akuntansi, menambah system informasi akuntansi atau memperbaiki/meng-update system informasi akuntansi, dan

pemantauan.

Selain itu dapat dilakukan dengan meningkatkan pencegahan kecurangan yaitu membangun struktur pengendalian intern yang baik, mengefektifkan aktivitas pengendalian, meningkatkan kultur organisasi, dan mengefektifkan fungsi audit internal.

Penelitian ini memperkuat temuan Taufik (2011), Rendika (2013), Armando (2013), Hendriani (2013), Komang dkk (2014), yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Pencegahan *Fraud*.

Pengaruh Pengawasan Internal berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud*

Hasil penelitian ini didapat Pengawasan Internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dimana hasil penelitian berbeda dengan hipotesis diawal. Hal tersebut terjadi karena manajemen dalam pengawasan internal yang mengeluarkan laporan pengendalian intern tidak menindaklanjuti kelemahan yang ada pada pengawasan intern sehingga hasilnya bermuara pada *fraud*. Hal itu terjadi karena manajemen tidak mengeluarkan laporan pengawasan intern yang berarti pihak manajemen tidak mengetahui kondisi pengawasan interennya sehingga tidak ada aliran perbaikan yang bermuara pada kualitas pencegahan *fraud*.

Pengawasan yang efektif dari pihak intern itu sendiri, bertindak sebagai pencegahan penyelewengan oleh manajemen senior, dengan mengawasi dalam penyusunan laporan keuangan guna menghasilkan informasi yang relevan, andal, mudah dipahami, dan dapat diperbandingkan. Untuk memperbaiki masalah yang ada pada pengawasan internal, dapat dilakukan dengan meningkatkan komunikasi, mengetahui cakupana udit, rekomendasi pelaporan, pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan, representasi manajemen internal audit, kualitas, independensi, kemampuan profesional. Pernyataan tersebut tidak didukung oleh hasil penelitian Taufik (2011), Rendika (2013), Yuliarta (2013), Sari (2012), Umar (2012) yang menyatakan pengawasan internal berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan *fraud*.

Pencegahan *Fraud* Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Dari hasil penelitian didapat Pencegahan *fraud* memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Peran auditor dalam pencegahan *fraud* sangat

memahami kecurangan dan jenis-jenis kecurangan yang mungkin terjadi dalam pemerintah. Struktur internal control sudah ditempatkan dan berjalan dengan baik, peluang adanya kecurangan yang tak terdeteksi akan banyak berkurang. Pemeriksa kecurangan harus mengenal dan memahami dengan baik setiap elemen dalam struktur pengendalian intern agar dapat melakukan evaluasi dan mencari kelemahannya.

Untuk memperbaiki masalah yang ada pada pencegahan *fraud*, dapat dilakukan dengan meningkatkan tindakan pencegahan terhadap upaya meminimalisasi kecurangan, pendeteksian terhadap upaya meminimalisasi kecurangan, Audit investigasi terhadap upaya meminimalisasi kecurangan. Selanjutnya penelitian ini mendukung Adeyemi, etal (2012), Bastian (2010) yang menyatakan bahwa pencegahan *fraud* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Hasil penelitian ini didapat variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini terlihat bahwa sistem pengendalian *intern* pemerintah dalam pemerintahan telah baik dilakukan, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada kualitas laporan keuangan daerah. Pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai sistem pengendalian *intern* pemerintah terutama pada pencatatan keuangan yang menyangkut pengelolaan dan penatausahaan asset. Agar kualitas yang dihasilkan laporan keuangan dari pemerintah dapat terus ditingkatkan. Pemerintah sebaiknya juga melakukan pengkajian ulang mengenai pengawasan keuangan daerah.

Jika pengendalian intern suatu badan usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan semakin besar sehingga kualitas laporan keuangan daerah juga berpengaruh. Sebaliknya, jika pengendalian intern suatu badan usaha kuat, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan bisa diperkecil begitu juga kualitas laporan keuangan daerah.

Pengaruh Pengawasan Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Hasil penelitian ini didapat Pengawasan Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal tersebut terjadi karena manajemen dalam pengawasan internal yang mengeluarkan laporan pengendalian intern tidak tindaklanjuti kelemahan yang ada pada pengawasan intern sehingga hasilnya bermuara pada kualitas laporan keuangan daerah. Manajemen tidak mengeluarkan laporan pengawasan intern yang berarti pihak manajemen tidak mengetahui kondisi pengawasan interennya sehingga tidak ada aliran perbaikan yang bermuara pada kualitas laporan keuangan.

Pengawasan yang efektif dari pihak intern itu sendiri, bertindak sebagai pencegahan penyelewengan oleh manajemen senior, dengan mengawasi dalam penyusunan laporan keuangan guna menghasilkan informasi yang relevan, andal, mudah dipahami, dan dapat diperbandingkan. Untuk memperbaiki masalah yang ada pada pengawasan internal, dapat dilakukan dengan meningkatkan komunikasi, mengetahui cakupan audit, rekomendasi pelaporan, pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan, representasi manajemen internal audit, kualitas, independensi, kemampuan profesional. Selanjutnya penelitian ini mendukung Astuti (2016) yang menyatakan bahwa Pengawasan Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Pengaruh langsung dan tidak langsung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh tidak langsung terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui pencegahan *fraud*. Laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem pengendalian intern pemerintah untuk mencegah terjadinya *fraud*. Kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern pemerintah daerah, Laporan keuangan dalam lingkungan sektor publik berperan penting dalam menciptakan pencegahan *fraud*.

Semakin besarnya tuntutan terhadap kualitas laporan keuangan dalam pencegahan *fraud* maka semakin meningkat sistem pengendalian intern pemerintah. Dengan demikian dapat dikatakan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh tidak langsung

terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui pencegahan *fraud*. Hasil penelitian ini didukung oleh Ponamon (2012) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh tidak langsung terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui pencegahan *fraud*.

Pengaruh langsung dan tidak langsung Pengawasan Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh pengawasan internal berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui pencegahan *fraud*. Pengawasan internal merupakan upaya untuk mengenali penyimpangan atau hambatan dalam pencegahan *fraud*. Pengawasan internal pemerintah daerah juga menentukan kualitas laporan keuangan yang baik dalam pencegahan *fraud*. Pengawasan intern pemerintah daerah terkait dengan kualitas laporan keuangan daerah merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan dalam mendeteksi *fraud*. Salah satu komponen pengendalian intern yaitu aktivitas pengawasan yang berhadapan dengan penilaian berkala atau berkelanjutan dari mutu penampilan/prestasi pengendalian intern.

Salah satu fungsi pengawasan adalah pengambilan tindakan korektif, yaitu apabila ditemukan adanya penyimpangan, *fraud*, kekeliruan, serta pemborosan dapat segera diperbaiki, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menjadi valid dan relevan. Dengan demikian dapat dikatakan pengawasan intern pemerintah berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui pencegahan *fraud*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian ini didukung oleh Taufik (2011), Rendika (2013), Hendriani (2013), Armando (2013), Hendriani (2013), Komang dkk (2014), dan Pengawasan internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hasil penelitian tidak didukung Taufik (2011), Rendika (2013), Yuliarta (2013), Sari (2012),

Umar (2012), sedangkan, Pencegahan *fraud* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, hasil penelitian ini didukung oleh Adeyemi, et al (2012) , Bastian(2010). dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Pengawasan Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, hasil penelitian ini didukung oleh Astuti (2016)., dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh tidak langsung terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah melalui Pencegahan *fraud*, hasil penelitian ini didukung oleh Ponamon (2012). Sedangkan Pengawasan Internal berpengaruh langsung terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah melalui Pencegahan *fraud*.

SARAN

Implikasi manajerial dari hasil penelitian ini yaitu dapat memberikan masukan kepada pihak terkait pemerintah daerah Bogor dan Depok diharapkan lebih memperhatikan pengawasan internal. Semua itu akan bermuara pada makin kuatnya tekanan untuk meningkatkan pencegahan *fraud* mutu kehidupan berkarya yang pada gilirannya menuntut pengakuan dan penghargaan atas harkat dan martabat para karyawan. Cara terbaik untuk meningkatkan pengawasan internal yaitu dengan cara memberikan pelatihan dan pendidikan dalam menjalankan pengawasan internal, sehingga diharapkan akan berpengaruh pada pencegahan *fraud* serta dapat memotivasi kerja pegawai yang pada akhirnya mereka akan memberikan kontribusi yang lebih besar lagi terhadap pemerintah.

Penelitian dimasa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas lagi dengan adanya beberapa masukan yaitu dapat memperbanyak jumlah sampel dan memperluas wilayah cakupan sampel yang tidak hanya pemerintah daerah Bogor dan Depok, dan juga menggunakan variabel yang lebih bervariasi dengan menambah variabel lainnya yang memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* dan kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan Untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan variabel moderasi yaitu independensi untuk memperkuat pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengawasan internal terhadap pencegahan *fraud* serta implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

DAFTARPUSTAKA

- Aikins, K.S. (2012). Deterinants of Auditee Adoption of Audit Recommendations: LocalGovernment Auditors Perspective. *Journal of Budgeting, Accounting, andFinancial Management*, 195-220.
- Akmal. (2009). *Pemeriksaan Manajemen Internal Audit Edisi Kedua*. Jakarta: PT Indeks Jakarta.
- Agoes Sukrisno (2008). *Auditing Pemeriksaan Oleh Kantor Akuntan Publik*. Jilid satu. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Apriadi Rangga Nuh, dan Fachriyah Nurul. *Determinan Terjadinya Fraud diInstitusi Pemerintahan*. Malang, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Astuti Yulia. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan implikasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Program studia kuntansi, fakultas ekonomi dan bisnis Universitas komputer indoneisa, Bandung.
- Dewantara, Iqbal. (2013). *Peranan Efektifitas Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (tidak dipublikasikan)*
- Dwi Komang Sartika, Cipta Wayan, dan Bagia I wayan, (2014), *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen, Vol 2*.
- Hendriani Susi, (2013), *Pengaruh Pendidikan dan Latihan Serta Kompetensi Terhadap Implementasi SPIP Guna Pencegahan Fraud*, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 2, No 1, Oktober 2013, 84-100.
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Ikhtisar Hasil Periksaan, 2014*. Jakarta: BPK RI di unduh dari www.bpk.go.id (diakses 6 May 2017)
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Ikhtisar Hasil Periksaan semester I dan II, 2015*. Jakarta: BPK RI diunduh dari www.bpk.go.id (diakses 28 April 2017)
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Ikhtisar Hasil Periksaan SemeterIdan II, 2016*. Jakarta: BPK RI diunduh dari www.bpk.go.id (diakses 28 April 2017)
- Karo Karo Rio Sempana, (2015). *Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Pemerintah Kabupaten Bandung*.

- Kementerian Dalam Negeri, 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006* tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: kemendagri.
- Kementerian Dalam Negeri, 2010. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 2010* tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: kemendagri
- Mahmudi, (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP-STIMYKPN
- Manossoh Hendrik. 2016. *A Number of Factors That Cause Fraudat The Government Of North Sulawesi Province*, EMBA, Vol4 No.1.
- Meikhatiety, dan Rahayu Istiyawati, (2015), *Peranan Audit Internal dan Pencegahan Fraud Dalam Menunjang Efektifitas Pengendalian Internal*, Jurnal Paradigma, Vol. 13, No. 01, Februari-Juli 2015.
- Nia Elham Hady, Said Jamilah, (2015). *Assessing Fraud Risk Factor of Assets Misappropriation: Evidences from Iranian Banks*, Elsevier, *Procedia Economic sand Finance* 31, 919-924.
- Ponamon Irene Fransisca, (2012). *Pengaruh pengawasan internal, pemahaman sistem akuntansi keuangan, dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah pada KSPD pemerintah kota menado*.
- Setyowati Lilis dan Isthika Wikan (2014). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Semarang*, *Proceedings SNEB2014*.
- Santoso Budi Eli, *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur)* (tidak dipublikasikan).
- Sari Diana, (2012), *Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Perkembangan Peran Akuntansi Dalam Bisnis Yang Profesional*, Bandung, Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis.
- Syarifudin Akhmad, (2014). *Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen)*, *Jurnal Fokus Bisnis*, Vol 14, No 02, bulan Desember.
- Umar, Haryono (2012), *Pengawasan Untuk Pemberantasan Korupsi*, *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Volume 8/No. 2, Mei 2012: 95-189.

(2016), *Corruption The Devil*, Cetakan Pertama, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.

(2006), *Strategic Control*, Cetakan Pertama, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Undang-Undang No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Undang-Undang No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan Yohanes Elieser, Paton Adri, dan Alaydrus Anwar, 2016. Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Bulungan. E-Journal Administrative Reform, 4(1):65-78

www.tribunnews.com/nasional/2017/05/27/kronologi-lengkap-operasi-tangkap-tangan-auditor-utama-bpk-dan-irjen-kementerian-desa

www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/05/28/oqndr3330-haryono-umar-posisi-irjen-kerap-tutupi-kebobrokan-di-kementerian

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/868573-lebih-60-kepala-daerah-diciduk-kpk-bukti-pengawasan-lemah>

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/907000-mantan-wali-kota-cimahi-didakwa-gratifikasi-rp3-9-miliar>